

# PERAN GREEN SUKUK DALAM MEMPERKOKOH POSISI INDONESIA DI PASAR KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

Yulia Anggraini

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: lia.anggra0407@gmail.com

**Abstract:** *This research was motivated by the development of sukuk in Indonesia from an international perspective in 2016 which gave positive results. Where Indonesia is the big issuer of sukuk with a total issuance of USD 10, 5 billion from the total issuance of sukuk by the government from all over the world. In the midst of the development of sukuk instruments, there are also instruments such as green bonds that offer investments in environmental development. With the presence of green bonds as investment instruments in the environment, a sharia investment instrument has emerged which has the same concentration as a green bond. The instrument is then called green sukuk. Indonesia is listed as a pioneer in the issuance of green bonds in the Southeast Asia region. The purpose of this study is to identify the potential of sukuk green publishing in Indonesia to strengthen Indonesia's position in the global sharia financial market. This study uses a qualitative approach using historical methods.*

**المخلص:** يتم تحفيز هذا البحث من خلال نظرة إيجابية من المنظور الدولي حول تطوير الصكوك في إندونيسيا في عام ٢٠١٦. حيث تعد إندونيسيا المصدر الكبير للصكوك بإجمالي ٥١٠ دولارات أمريكية من إجمالي إصدارات الصكوك من قبل الحكومة من جميع أنحاء العالم. في خضم تطوير التي تقدم استثمارات في التنمية البيئية green bond أدوات الصكوك، هناك أدوات مثل

بعد وجود هذه الأدوات كأداة استثمار في البيئة، تظهر أداة استثمار الشريعة التي لها نفس ومن هنا تم إدراج إندونيسيا كرائد في إصدار green sukuk تركيز له يسمى الصكوك الخضراء السندات الخضراء في منطقة جنوب شرق آسيا. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد إمكانات النشر الأخضر للصكوك في إندونيسيا لتعزيز مكانة إندونيسيا في السوق المالية الشرعية العالمية. تستخدم هذه الدراسة منهجاً كمياً باستخدام الطريقة التاريخية

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan sukuk di Indonesia dari kacamata internasional pada tahun 2016 yang memberikan hasil positif. Dimana Indonesia merupakan the big issuer sukuk dengan total penerbitan USD 10,5 Milyar dari total penerbitan sukuk oleh pemerintah dari seluruh dunia. Ditengah perkembangan instrumen sukuk telah hadir juga instrumen berupa green bond yang menawarkan investasi pada pembangunan lingkungan. Dengan hadirnya green bond sebagai instrumen investasi pada lingkungan telah muncul sebuah instrumen investasi syariah yang konsentrasinya sama dengan green bond. Instrumen tersebut kemudian disebut green sukuk. Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi penerbitan green sukuk di Indonesia memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode historis.

**Keywords:** *green bond, green sukuk, perkembangan green sukuk, investasi*

## PENDAHULUAN

Konsep keuangan yang berbasis syariah saat ini telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi pilihan bagi pasar yang menghendaki transaksi syariah. Pasar keuangan dunia saat ini telah menggunakan transaksi dan investasi yang berbasis syariah yang dimulai di negara Timur Tengah dan Asia Tenggara dan saat ini di kedua Negara tersebut transaksi dan investasi berbasis syariah berkembang sangat pesat. Disamping itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur keuangan syariah global juga telah didirikan, seperti *Islamic Development Bank (IDB)*, *International Financial Service Board (IFSB)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*, dan lain-lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai mediator. Salah satu lembaga keuangan yang ada saat ini adalah pasar modal yang memiliki fungsi sama dengan lembaga keuangan pada umumnya. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pasar modal merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk melakukan investasi yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun tidak sedikit kegiatan yang dilakukan di pasar modal ini terdapat unsur riba, dimana riba sendiri merupakan kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.<sup>3</sup> Hal inilah yang menyebabkan umat muslim cenderung untuk menghindari bahkan menolak untuk berinvestasi dalam pasar modal di Indonesia.

Ekonomi Islam yang sedang mengalami perkembangan pesat juga memberikan ruang untuk diterbitkannya obligasi syariah yang dikenal dengan istilah sukuk. Para investor yang ingin keluar dari transaksi riba tentunya memberikan respon positif dengan adanya sukuk. Sehingga mendorong pasar modal untuk menerbitkan sukuk yang sesuai dengan akad atau kontrak legal dalam Islam.

Investasi syariah dengan menggunakan prinsip yang berbasis syariah telah tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam perekonomian

---

<sup>2</sup> "Pengantar Pasar Modal," t.t., <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>.

<sup>3</sup> Ali Arsalan Tariq dan Humayon Dar, "Risks of Sukuk Structures: Implications for Resource Mobilization," *Loughborough University, Thunderbird International Business Review*, 49 (2), no. March–April 2007 (2007), .206.

Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia saat ini mulai beralih dari masyarakat yang berorientasi pada perbankan umum menuju masyarakat yang berorientasi pada pasar modal. Mereka mulai menyadari bahwa investasi pada pasar modal lebih menguntungkan jika dibandingkan investasi pada perbankan. Selain itu pasar modal juga memberikan *return* yang lebih besar untuk mereka jika dibandingkan dengan perbankan, walaupun tentunya risiko yang ditanggung oleh mereka juga lebih besar. Semakin besarnya peran pasar modal dalam memobilisasi dana ke sector-sektor produktif telah membuat meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi pada obligasi syariah. Hal ini diikuti dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam konsep syariah.

Pada tahun 2002, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata *return* obligasi konvensional. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata.<sup>4</sup>

Saat ini, beberapa negara telah menjadi *regular issuer* dari *sukuk*, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan *sukuk* negara (*sovereign sukuk*) tersebut biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, *sukuk* juga dapat digunakan untuk keperluan pembiay-

---

<sup>4</sup> Muhamad Jakarsih dan Aam Slamet Rusydiana, "Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Dunia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi: Antisipasi* 1, no. 2 (Dedember 2009).

aan *cash-mismatch*, yaitu dengan menggunakan *sukuk* dengan jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.<sup>5</sup>

Perkembangan *sukuk* di dunia dimulai dengan penerbitan *sovereign sukuk*, namun pada tahun-tahun berikutnya *sukuk* korporasi (*corporate sukuk*) lebih mendominasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014, *sovereign sukuk* masih mendominasi pasar *sukuk* global yaitu sebesar 42% dan *sukuk* yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%. Namun pada tahun 2007, justru *sukuk* korporasi yang mendominasi pasar *sukuk* global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%. Umumnya, penerbitan *sukuk* korporasi ditujukan untuk ekspansi usaha, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara (Malaysia).<sup>6</sup>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2018 sebesar Rp200,2 triliun atau sekitar 1,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun defisit disumbang oleh penerimaan negara sebesar Rp1.312,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.512,6 triliun hingga akhir September 2018.<sup>7</sup> *Kondisi APBN Indonesia yang mengalami defisit salah satunya karena belanja negarayang lebih besar daripada pendapatan negara, baik dari penerimaan pajak maupun dari penerimaan bea cukai.*

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk dapat menopang kebutuhan belanja negara yang sangat besar, dan pendapatan pajak belum mampu meng-cover kebutuhan tersebut secara penuh. Secara undang-undang pun tidak ada masalah. Namun efeknya terhadap perekonomian nasional menjadi tidak terlalu besar, apalagi jika

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 3 ed. (Yogyakarta: Ekonesia, 2008). 299.

<sup>6</sup> "Annual Report Of Standart & Poor's Credit Market Service Europe Limited South Africa Branch For The Financial Year Ended 31/12/2015" (New York USA: S&P Global, Inc., t.t.).

<sup>7</sup> Rafida Ulfa, "Kondisi APBN per September 2018 Defisit Rp200,2 Triliun, Begini 5 Faktanya," *Okezone* (blog), Oktober 2018.

dana yang didapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang rutin dilakukan oleh pemerintah.

Indonesia sebagai salah satu negara penerbit sukuk sudah saatnya menggunakan instrumen ini untuk mempromosikan peran Indonesia dalam mendukung terciptanya bumi yang lebih nyaman. Sukuk sebagai instrument keuangan yang banyak memiliki kemiripan dengan obligasi (*bond*) dapat digunakan untuk mendukung program-program dalam rangka mengurangi pemanasan global dan dampaknya.

Perubahan iklim saat ini telah menjadi ancaman nyata bagi penduduk bumi. Dorongan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperdulikan lingkungan, seperti industrialisasi, pembakaran hutan, pengeboran dengan mengesampingkan lingkungan, dll. Kondisi ini akan berdampak padakenaikan suhu rata-rata di bumi, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan frekuensi bencana yang berhubungan dengan cuaca seperti penyediaan sumber makanan dan air minum. Apabila tidak ada langkah signifikan untuk mengurangi keadaan tersebut, diperkirakan pada tahun 2100 suhu rata-rata di bumi meningkat 4,5 derajat Celcius dan permukaan air laut naik sekitar 95 cm. Beberapa Negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, Maladewa, dan Karibia akan kehilangan sebagian besar wilayahnya.<sup>8</sup>

Lembaga-lembaga internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia telah menyelenggarakan berbagai pertemuan yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan guna mengurangi emisi karbon dan mengatasi dampak pemanasan global. Pertemuan tersebut diantaranya adalah *The Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework on Climate Change* sejak tahun 1990, Konferensi Perubahan Iklim pertama di Toronto Kanada pada tahun 1998 yang merupakan kelanjutan dari Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk perubahan iklim sejak tahun 1992 yang terus ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan Conference of Par-

---

<sup>8</sup> Eri Hariyanto, "Peluang Penerbitan Green Sukuk" (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, 2017).

ties ke 21 (COP 21) pada tanggal 30 November s.d. 11 Desember 2015 di Paris Perancis. Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin negara anggota, CEO perusahaan swasta, maupun komponen masyarakat lainnya yang menghasilkan berbagai ide dan inisiatif untuk melakukan tindakan nyata dan mengikat dalam mengurangi pemanasan global dengan menurunkan emisi karbon.<sup>9</sup>

Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menyampaikan komitmennya sebagai upaya kontribusi dalam aksi global menurunkan emisi sebagaimana yang tercantum dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Indonesia, untuk menurunkan emisi hingga 29 persen dengan melalui "business as usual" sampai 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional. Hasil penelitian para ahli lingkungan menyebutkan bahwa 26% penyumbang pemanasan global berasal dari penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik, sarana transportasi, dan mesin-mesin industri. Penggunaan bahan bakar tersebut menghasilkan emisi gas CO<sub>2</sub> berlebihan ke udara sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Untuk itu, sebagai hasil deklarasi perubahan iklim masing-masing negara bertekad mengurangi secara drastis penggunaan bahan bakar fosil dengan berbagai cara, misalnya dengan menggiatkan penggunaan bahan bakar dan pembangkit tenaga listrik ramah lingkungan, transportasi massal, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengurangan emisi karbon (green infrastructure) dll. Pembiayaan proyek-proyek tersebut selain berasal dari masing-masing negara, juga dapat memanfaatkan dukungan dari berbagai lembaga keuangan internasional dengan berbagai skema. Salah satu skema yang dirintis oleh World Bank adalah dengan menerbitkan Green Bond.

Berdasarkan model *Green Bond* yang dikembangkan oleh Bank Dunia, pemerintah dapat mengembangkan *Green Sukuk* untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung program pengurangan emisi karbon. Pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor yang sedang gencar dijalankan oleh Pemer-

---

<sup>9</sup> Hariyanto.

intah merupakan potensi untuk mengembangkan *Green Sukuk*. Saat ini pemerintah telah memiliki program pembangunan infrastruktur terpadu yang terdapat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Agar program ini sejalan dengan program pengurangan emisi karbon, nampaknya perlu menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dalam MP3EI dengan konsep *green infrastructure*. Beberapa proyek potensial yang dapat dikategorikan sebagai *green infrastructure* misalnya: pembangkit listrik dengan energi terbarukan seperti tenaga angin, tenaga surya dan panas bumi, serta transportasi massal di kota-kota besar untuk para komuter. Selanjutnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah dapat menerbitkan Sukuk Negara.

Penerbitan *Green Sukuk* dapat menjadi sarana pengembangan basis investor karena saat ini telah berkembang investor korporasi maupun individu yang sangat perhatian terhadap isu lingkungan terutama penanggulangan perubahan iklim. Sampai saat ini belum ada negara yang menerbitkan *Green Sukuk* di pasar perdana internasional. Apabila Pemerintah dapat menyiapkan dalam waktu singkat, maka Indonesia akan menjadi negara pertama penerbit *Green Sovereign Sukuk*.

Penerbitan *Green Sukuk* oleh pemerintah sebenarnya hampir sama dengan Sukuk Negara lainnya karena Sukuk Negara saat ini hasil penerbitannya mayoritas digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Hanya saja infrastruktur yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) harus memenuhi kriteria *green infrastructure*. Infrastruktur dari sektor pertanian seperti pembangunan waduk, irigasi, dan PLTA sangat potensial untuk dikategorikan sebagai *green infrastructure* karena menunjang pemanfaatan air agar lebih berdaya guna (*sustainable water management*), mengurangi penggunaan air tanah untuk pertanian, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan non fosil.<sup>10</sup>

Surat utang syariah untuk pembangunan proyek berbasis lingkungan atau *green sukuk* tampaknya masih menjadi andalan Indonesia

---

<sup>10</sup> Hariyanto.

di 2019. Hal ini karena penerbitan green sukuk untuk pertama kalinya pada Maret 2018 lalu mendapat respons positif dari pasar. Untuk itu, pemerintah kembali mempertimbangkan untuk kembali menerbitkan green sukuk di tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa ketertarikan investor terhadap green sukuk berlatar keinginan pasar untuk menambah portofolio mereka.<sup>11</sup>

Dari jurnal terdahulu dengan judul “Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia” oleh Irfan Syauqi Beik, dimana dijelaskan perkembangan sukuk yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana sukuk juga berperan sebagai sumber dana investasi untuk pembangunan sector riil. Sedangkan dari jurnal ini penulis ingin membahas dan mengkhususkan tentang peran dari *green* sukuk untuk memperkuat posisi Indonesia di Pasar Keuangan Syariah Global.

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode historis. Historis / Sejarah ialah studi tentang masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan. Metode Historis ialah metode yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu.<sup>12</sup>

## SUKUK

*Sukuk* adalah jamak dari kata *sakk* (instrument yang legal, tanda kepemilikan atau cek) adalah istilah Arab untuk suatu sertifikat kepercayaan pada investasi syariah, pada beberapa tahun terakhir sukuk menjadi populer pada pasar modal, sejak masa kejayaan Islam pada abad ke-13, *sakk* disebut-sebut sebagai sumber cek (*cheque*) yang

---

<sup>11</sup> Fajar Sulaiman, “Pemerintah Bakal Terbitkan Green Sukuk Kembali di 2019,” Oktober 2018.

<sup>12</sup> Iqbal Hasan, “Metodologi Penelitian dan Aplikasinya” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 22.

berkembang di Eropa, yang mana merepresentasikan suatu kontrak atau hak atas suatu hutang.<sup>13</sup>

Pada sejarah Islam istilah sukuk bukanlah hal yang kontemporer, istilah *sukuk* telah dikenal oleh masyarakat Arab sejak zaman dahulu setelah terjadinya ekspansi perdagangan ke negara-negara lain. AAOIFI mengdefinisikan *sukuk* sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *sukuk* sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten, untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa *bagi hasil*, *margin* dan *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>15</sup>

Menurut Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan

---

<sup>13</sup> Al-Saeed Khalid Sulaiman, "Sukuk Issuance in Saudi Arabia: Recent Trends and Positive Expectation" (Durham University, 2012).

<sup>14</sup> "Sukuk are defined as certificates of ownership of a pool of underlying assets, in which the certificates are of equal value, issued with the aim of using the mobilised funds for establishing a new project, developing an existing project, or financing a business activity as per their respective shares.," 2003.,"plainCitation": "Sukuk are defined as certificates of ownership of a pool of underlying assets, in which the certificates are of equal value, issued with the aim of using the mobilised funds for establishing a new project, developing an existing project, or financing a business activity as per their respective shares.," 2003.,"noteIndex":14,"citationItems":[{"id":54,"uris":["http://zotero.org/users/local/m9XiXULD/items/EGX9227S"],"uri":["http://zotero.org/users/local/m9XiXULD/items/EGX9227S"],"itemData":{"id":54,"type":"paper-conference","title":"Sukuk are defined as certificates of ownership of a pool of underlying assets, in which the certificates are of equal value, issued with the aim of using the mobilised funds for establishing a new project, developing an existing project, or financing a business activity as per their respective shares.,"event":"Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI

<sup>15</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional- Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah" (DSN-MUI, 2002).

berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan *sukuk*. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk Negara.

### **GREEN BOND**

Pengembangan konsep obligasi hijau (*Green Bond*) pertama kali dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2008 sebagai bagian dari “*Strategic Framework for Development and Climate Change*”. Konsep ini juga sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan investor yang ingin berinvestasi pada instrumen pembiayaan yang berhubungan dengan perubahan iklim dunia dan aksi penyelamatan bumi. GB saat ini digunakan untuk menggalang dana dari para investor untuk mendukung program Bank Dunia dalam proyek-proyek yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sampai saat ini Bank Dunia telah menerbitkan GB senilai USD8,5 miliar dalam 18 mata uang. GB merupakan instrumen investasi berkualitas tinggi karena memperoleh *triple-A rating* (berisiko sangat rendah). Untuk menentukan kriteria proyek yang layak untuk dibiayai dengan GB, Bank Dunia menunjuk suatu institusi independen untuk melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang diajukan. Institusi tersebut diantaranya adalah the *Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo* (CICERO) yang bertugas memberikan opini dan pedoman untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan persyaratan investasi dalam GB.<sup>16</sup>

Proyek-proyek investasi GB dikategorikan dalam dua kriteria, yaitu untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Beberapa contoh proyek yang dikategorikan sebagai mitigasi perubahan iklim diantaranya: peningkatan efisiensi transportasi masal dan penggantian bahan bakar, pengurangan karbon melalui reboisasi dan deforestasi, pengolahan limbah, konstruksi bangunan hemat energi, instalasi surya dan angin, dll. Sedangkan proyek yang dikategorikan adaptasi terhadap peruba-

---

<sup>16</sup> Hariyanto, “Peluang Penerbitan Green Sukuk.”

han iklim diantaranya adalah: perlindungan terhadap banjir (termasuk reboisasi dan pengelolaan daerah aliran sungai), peningkatan ketahanan pangan, dan penerapan sistem pertanian dan pengelolaan hutan yang menghambat laju deforestasi.

### **GREEN SUKUK**

Dana hasil penjualan green sukuk ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori green. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan green di antaranya: efisiensi energi dan *renewable energy*, *green building*, *green tourism*, *disaster risk reduction*, *sustainable transport*, *waste to energy* dan *waste management*, *sustainable management natural resources* serta *sustainable agriculture*.<sup>17</sup>

Panduan umum *green* sukuk pemerintah itu sendiri sudah melewati tahapan review secara mendalam oleh CICERO (Center for International Climate Research) salah satu lembaga pemeringkat terkemuka dunia berbasis di Norwegia. Di tahun 2016, CICERO mendapatkan pengakuan dari Climate Bonds Initiative serta di tahun 2017 mendapatkan anugerah the best external reviewer in the Worlds untuk bidang penerbitan green bonds dan sukuk negara, dari lembaga Environmental Finance. Oleh CICERO, dokumen panduan green bonds dan Sukuk Indonesia diberikan penilaian medium green dengan rekomendasi yang sangat strong. Hal ini sangat terkait dengan kelengkapan dokumen yang dapat disampaikan sebagai indikator awal kesiapan pemerintah dalam mendukung penerbitan green sukuk ini. Di level global, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan green sukuk ini setelah sebelumnya beberapa negara lain seperti Prancis, Fiji dan Polandia sudah terlebih dahulu menerbitkan green bonds.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Joko Tri Haryanto, "Green Sukuk dan Era Baru Pendanaan Lingkungan," *Berita Satu* (blog), 20 Maret 2018.

<sup>18</sup> Tri Haryanto.

Selain menunjukkan komitmen pemerintah, green sukuk ini juga merupakan instrumen yang memberikan sinyal atas dukungan Indonesia terhadap perluasan pasar *green bond* dan *green sukuk* baik domestik maupun internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara. Karenanya, Indonesia patut bangga terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan menuju masa transisi pembangunan rendah karbon.

## PERKEMBANGAN GREEN SUKUK

Pada Maret 2018 lalu, pemerintah menerbitkan sukuk negara di pasar global (global sukuk) senilai total 3 miliar dolar AS. Sukuk negara ini terdiri atas *global green sukuk* senilai 1,25 miliar dolar AS (setara Rp 16,7 triliun) dan *regular global sukuk* senilai 1,75 miliar dolar AS. Respons pasar terhadap penerbitan sukuk hijau ternyata positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa ketertarikan investor terhadap sukuk hijau berlatar keinginan pasar untuk menambah portofolio mereka.<sup>19</sup>

Meski tetap mengandalkan sukuk hijau sebagai salah satu instrumen pembiayaan selain *regular sukuk* dan *regular bond*, pemerintah masih belum punya kepastian berapa nilai yang akan diterbitkan pada 2019 nanti. Kementerian Keuangan baru akan memutuskan angka penerbitan sukuk hijau untuk 2019 setelah ada kesepakatan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 bersama parlemen. Namun yang jelas, sukuk hijau masih menjadi opsi pilihan di tengah alternatif sumber pembiayaan.

## PERKEMBANGAN SUKUK NEGARA

Perkembangan Sukuk Negara menunjukkan peningkatan yang pesat, dimana perkembangan selama sepuluh tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Peningkatan jumlah penerbitan dan kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN, dengan rata-rata sekitar 30 persen dari total pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya. Total akumulasi penerbitan Sukuk Negara

---

<sup>19</sup> Sapto Andika Candra, "Green Sukuk Tetap Jadi Andalan di 2019," *Republika* (blog), Oktober 2018.

hingga bulan Oktober 2018 telah mencapai lebih dari Rp950 triliun (USD63 miliar) dengan *outstanding* per 25 Oktober 2018 sebesar Rp 657 triliun. 2) Sejak tahun 2013, mulai dikembangkan Sukuk Negara yang di-*earmarked* untuk pembiayaan proyek, yaitu *Project Financing Sukuk* (Sukuk Proyek). Dalam kurun waktu 2013-2018, total alokasi Sukuk Proyek telah mencapai Rp62,4 triliun yang tersebar di 34 provinsi. Proyek yang dibiayai melalui Sukuk Proyek diantaranya mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan proyek sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah), pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, pembangunan dan rehabilitasi Kantor Urusan Agama dan Manasik Haji, pembangunan Taman Nasional (Baluran, Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata/Halmahera), pembangunan dan pengembangan madrasah, serta pembangunan dan pengembangan laboratorium.

3) Penerbitan Sukuk Negara untuk investor individu Warga Negara Indonesia secara reguler sejak tahun 2009 sebagai instrumen inklusi finansial yang efektif. Selama sepuluh tahun, total penerbitan Sukuk Ritel mencapai Rp144,7 triliun dengan jumlah investor sebanyak 243.364 orang. Selain itu, penerbitan Sukuk Tabungan mencapai Rp2,6 triliun dengan jumlah investor sebanyak 11.338 orang dan rata-rata nominal investasi mencapai Rp228 juta per investor. 4) Penerbitan Sukuk Global secara rutin sejak tahun 2009 telah berhasil memposisikan Indonesia sebagai the largest international sovereign sukuk issuer. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk di dunia. Hal ini merefleksikan dukungan dan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan pasar keuangan syariah domestik maupun internasional.

5) Sukuk Negara juga telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak, ditandai dengan diraihnya 29 penghargaan bertaraf internasional dari berbagai lembaga, antara lain Alpha Southeast Asia, The Asset, Finance Asia, Credit Magazine, Asia Money, IFR Asia, Islamic Finance News, Euromoney Islamic Finance Awards,

dan Global Islamic Finance Awards. Yang terbaru, Sukuk Negara berhasil memperoleh penghargaan “*Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year*” dari Global Capital/Euromoney pada September 2018.<sup>20</sup>

Agar proyek-proyek yang dibiayai dengan penerbitan Sukuk Negara sesuai dengan ketentuan syariah dan memenuhi kriteria *green infrastructure*, maka pemerintah dapat melakukan tahap-tahap berikut: 1) Identifikasi Proyek, proses pada tahapan ini untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan memenuhi kriteria sebagai proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Identifikasi ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan proyek tersebut. Proses identifikasi ini menghasilkan beberapa proyek yang diusulkan pada tahap selanjutnya. 2) Persiapan dan Penilaian Kelayakan Proyek, hasil identifikasi pada tahap pertama dilanjutkan dengan penyiapan studi kelayakan proyek oleh instansi pemerintah selaku pelaksana proyek. Selanjutnya studi kelayakan tersebut dinilai oleh instansi pemerintah yang berwenang (misal: Bappenas) atau bekerja sama dengan lembaga independen yang mempunyai keahlian pada bidangnya. Selain itu, dalam tahap ini untuk menilai kesesuaian proyek dengan kriteria syariah, pemerintah dapat meminta DSN MUI untuk memberikan opininya. Apabila telah memenuhi kriteria, proyek tersebut selanjutnya dapat diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara dalam APBN sesuai aturan yang berlaku.

3) Penerbitan *Green Sukuk*, setelah proyek tersebut dianggarkan dalam APBN, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pembiayaan atas proyek tersebut. Penerbitan Sukuk Negara untuk membiayai Green Infrastruktur dapat mengikuti mekanisme penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek yang telah berjalan sejak tahun 2012. 4) Implementasi dan Penyelesaian Proyek,

---

<sup>20</sup> Andi Abdurrochim, “Sudah Satu Dasawarsa Sukuk Negara Berkontribusi Nyata Untuk Kemaslahatan Bangsa,” *Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan* (blog), 10 Februari 2018.

pelaksanaan proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait, misalnya melalui proses pelelangan dan penyelesaian proyek sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan. Demikian halnya penggantian pembiayaan kepada rekanan pemerintah mengikuti aturan pembiayaan proyek yang telah ada.

5) **Monitoring Proyek**, monitoring proyek dilaksanakan pada saat proyek dimulai sampai dengan penyelesaian proyek yang bertujuan untuk memantau kemajuan proyek, kemudian dilaporkan secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi independen yang diberi tugas oleh pemerintah. Monitoring dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. 6) **Evaluasi Proyek**, untuk memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan rencana, termasuk proses pelelangan, pengelolaan keuangan, manfaat maupun dampak dari implementasi proyek serta kesinambungan proyek maka dilaksanakan kegiatan evaluasi. Kegiatan ini dapat memberikan masukan untuk keberlangsungan proyek di masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi independen yang diberi tugas oleh pemerintah.

## **PENUTUP**

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pengembangan Sukuk Negara sebagai bagian dari kreatif dan *innovative financing* dalam pembiayaan APBN. Dalam hal ini pembahasan pada *Green Sukuk*. Selain itu, berbagai upaya juga akan dilakukan untuk mendukung pendalaman pasar dan memperluas basis investor domestik, serta meningkatkan likuiditas Sukuk Negara di pasar sekunder, antara lain melalui inovasi instrumen, penyempurnaan infrastruktur kelembagaan dan pasar SBSN, termasuk pengembangan jalur distribusinya.

Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *Green Sukuk* senilai US\$1,25 miliar pada bulan Maret 2018. Transaksi ini merupakan

penerbitan *Green Sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*the world's first sovereign green sukuk*).

Selain semakin memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, penerbitan *Green Sukuk* ini juga merupakan manifestasi komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* yang diratifikasi pada tahun 2016 dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih rendah karbon dan tahan atas perubahan iklim. *Green sukuk* pemerintah mencatatkan kelebihan permintaan. Karena itu ke depan, *green sukuk* menjadi layak untuk diterbitkan lagi karena dinilai cukup efisien.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrochim, Andi. "Sudah Satu Dasawarsa Sukuk Negara Berkontribusi Nyata Untuk Kemaslahatan Bangsa." *Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan* (blog), 10 Februari 2018. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>.
- Andika Candra, Sapto. "Green Sukuk Tetap Jadi Andalan di 2019." *Republika* (blog), Oktober 2018.
- "Annual Report Of Standart & Poor's Credit Market Service Europe Limited South Africa Branch For The Financial Year Ended 31/12/2015." New York USA: S&P Global, Inc., t.t.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional- Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah." DSN-MUI, 2002.
- Hariyanto, Eri. "Peluang Penerbitan Green Sukuk." *DIItjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan*, 2017.
- Hasan, Iqbal. "Metodologi Penelitian dan Aplikasinya." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- Jakarsih, Muhamad, dan Aam Slamet Rusydiana. "Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Duinia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi: Antisipasi* 1, no. 2 (Dedember 2009).
- Khalid Sulaiman, Al-Saeed. "Sukuk Issuence in Saudi Arabia: Recent Trends and Positive Expertation." Durham University, 2012.
- "Pengantar Pasar Modal," t.t. <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. 3 ed. Yogyakarta: Ekonesia, 2008.
- "Sukuk are defined as certificates of ownership of a pool of underlying assets, in which the certificates are of equal value, issued with the aim of using the mobilised funds for establishing a new project, developing an existing project, or financing a business activity as per their respective shares.," 2003.
- Sulaiman, Fajar. "Pemerintah Bakal Terbitkan Green Sukuk Kembali di 2019," Oktober 2018.
- Tri Haryanto, Joko. "Green Sukuk dan Era Baru Pendanaan Lingkungan." *Berita Satu* (blog), 20 Maret 2018.
- Ulfa, Rafida. "Kondisi APBN per September 2018 Defisit Rp200,2 Triliun, Begini 5 Faktanya." *Okezone* (blog), Oktober 2018.